

Judul : Sarankan optimalkan fasilitas pengujian, komisi VII minta Kemenperin bantu IKM atasi kendala SNI
Tanggal : Minggu, 13 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Sarankan Optimalkan Fasilitas Pengujian

Komisi VII Minta Kemenperin Bantu IKM Atasi Kendala SNI

Senayan menyoroti masih banyaknya kendali Industri Kecil dan Menengah (IKM) memperoleh Standar Nasional Indonesia (SNI). Kendala utama adalah keterbatasan fasilitas pengujian di daerah.

ANGGOTA Komisi VII DPR Muhammad Hatta mengungkapkan, banyak perusahaan IKM kurang mendapatkan sistem pendukung dari Pemerintah. Itu membuat mereka sangat sulit memperoleh sertifikasi SNI. Karena itu, Pemerintah perlu hadir membantu para pelaku usaha itu agar mudah memperoleh fasilitas pendukung dalam penerapan standarisasi nasional.

Apalagi, pemenuhan standar SNI berkaitan erat dengan upaya IKM memperluas jangkauan pasar hingga ke luar negeri. Pelaku usaha menghadapi berbagai persyaratan di negara tujuan ekspor, sehingga SNI jadi bagian kesiapan produk. "Sayangnya proses itu belum optimal akibat keterbatasan akses laboratorium pengujian daerah," terangnya, Jumat (11/9/2026).

Menurutnya, fasilitas pengujian milik Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) di daerah perlu dimaksimalkan. Fasilitas itu bisa

dimanfaatkan untuk membantu IKM memenuhi persyaratan standarisasi tanpa perlu membawa peralatan besar ke wilayah lain yang memiliki sarana pengujian.

Kementerian diharapkan memperkuat koordinasi serta mengambil langkah konkret untuk mendukung IKM di berbagai daerah. Karena keberadaan satuan kerja standarisasi dan pelayanan jasa industri di sejumlah wilayah bisa jadi bagian sistem pendukung bagi pelaku IKM. Khususnya dalam menghadapi kendala jarak, waktu, tenaga, dan biaya.

Untuk Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), lanjutnya, bisa lebih fokus membantu IKM karena memiliki satuan kerja di seluruh Indonesia. Karena fasilitas Badan Standardisasi Nasional (BSN) masih terbatas di Yogyakarta dan Jakarta. Itu yang membuat pelaku IKM kesulitan membawa peralatan berukuran besar karena memakan waktu serta biaya tinggi.



Muhammad Hatta

Berikutnya, dukungan anggaran standarisasi dan pelayanan industri semestinya turut diarahkan untuk memperkuat IKM, bukan hanya perusahaan besar. "Sinergi Kementerian Perindustrian, BSN, dan pelaku usaha perlu ditingkatkan agar pemenuhan standar jadi instrumen peningkatan kualitas serta memperluas daya saing produk IKM di pasar internasional," ujarnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim mendorong penguatan fasilitas pengujian dan standarisasi agar IKM lebih mudah memenuhi SNI. Kemudahan akses labora-

torium pengujian jadi perhatian utama karena ketiadaan fasilitas uji terdekat membuat pelaku usaha harus mengeluarkan biaya serta waktu ekstra.

Pelaku industri di Jawa Timur, misalnya, harus melakukan pengujian hingga ke Yogyakarta demi memenuhi persyaratan sertifikasi SNI. Kondisi itu berpotensi membuat proses sertifikasi terhenti karena para pelaku usaha harus menanggung tambahan beban biaya operasional dan waktu pengujian yang cukup lama.

Jawa Timur sebagai basis industri besar, menurut Chusnunia semestinya memiliki fasilitas laboratorium pengujian lengkap agar kebutuhan standarisasi produk dapat dilayani di daerah. "Ini jadi pekerjaan rumah bagi BSN untuk melengkapi laboratorium setempat, sehingga proses sertifikasi SNI tidak terkendala jarak ke provinsi lain," ucapnya.

Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menambahkan, ada beberapa IKM pangan yang saat ini terkendala sertifikasi SNI akibat jauhnya lokasi uji laboratorium. Untuk itu Pemerintah dan BSN didorong untuk mempermudah sertifikasi

demi mendukung pencapaian target Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

Selain masalah sertifikasi, kondisi industri menengah saat ini juga masih menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya bahan baku serta penurunan serapan pasar. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, ketersediaan stok bahan baku sebenarnya masih relatif ada. Tapi harganya mengalami lonjakan kenaikan mencapai 12 persen.

Untuk itu, pelaku IKM diimbau bisa mengoptimalkan pemanfaatan berbagai program Pemerintah. Termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas, serta daya saing usaha. "Kegiatan produksi masih berjalan, namun tingkat serapan produk masyarakat di beberapa wilayah saat ini mengalami penurunan," jelasnya.

Sebelumnya Kemenperin menggandeng Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di berbagai daerah guna memperkuat akses IKM terhadap layanan sertifikasi SNI. Langkah kolaborasi itu jadi kunci utama karena para pelaku IKM secara alami jauh lebih dekat dengan dinas perindustrian di daerah masing-masing. ■ PVB